

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Sumatra Barat punya peran penting dalam terbukanya jalur dagang dan pelayaran di pesisir barat Sumatra. Berakhirnya kejayaan perdagangan di Selat Malaka membuat jalur perdagangan beralih ke pesisir barat Sumatra. Perkembangan ekonomi di sektor maritim ini membuat Karesidenan Sumatra Barat punya posisi penting dalam perkembangan politik masa kolonial Belanda maupun masa penjajahan Jepang. Masuknya Jepang di Sumatra dimulai dari kota Padang pada 17 Maret 1942. Jepang terlihat serius membangun kekuatan di Karesidenan Sumatra Barat. Jepang juga membentuk aparatur pemerintahannya di Sumatra Barat namun tidak jauh beda dengan masa kolonial Belanda. Memasuki fase akhir pemerintahan Jepang di Indonesia, Jepang terus mengalami kemunduran dalam pertahanan militer. Jepang terpaksa mengambil langkah politik untuk menarik dukungan dari politisi dan rakyat. Jepang di Sumatra Barat menolak deklarasi Kaiso untuk kemerdekaan Indonesia, dengan tetap berjuang mempertahankan kekuasaannya sampai menjelang kemerdekaan Indonesia.

Keadaan di Karesidenan Bengkulu menjelang kemerdekaan tidak begitu beda dengan Sumatra Barat. Jepang tidak merubah susunan pemerintahan Karesidenan Bengkulu, hanya mengubah tiap instansi dengan istilah Jepang. Ketika itu juga, para pribumi mendapatkan kesempatan memperoleh jabatan. Jepang secara tidak langsung juga memberikan otoritas kepada tiap *syucokan* untuk mengatur wilayahnya. Perekonomian Bengkulu pada masa pemerintahan Jepang tidak mengalami kemajuan. Jepang menerapkan jalur monopoli di mana Jepang

mengatur pembelian, penjualan dan pembagian hasil dengan rakyat. Rakyat dipaksa menyetor hasil ladang dan tangkapan di laut kepada Jepang. Jika ketahuan menyimpan sebagian hasil ladang dan tangkapan laut, *Kempeitai* segera mengambil simpanan mereka dan memberi hukuman. Saat Jepang memerintah di Bengkulu, masih ada 5 perkebunan yang bisa dimanfaatkan, hanya saja dilerantakan oleh para buruh. Perkebunan tersebut ditanami teh, kopi, cengkeh dan lada. Namun Jepang membakar habis perkebunan tersebut dan menanaminya dengan jarak dan palawija. Palawija menjadi bahan makanan pokok rakyat sedangkan pemerintah Jepang tetap mengkonsumsi beras. Jarak menjadi bahan baku pembuatan pelumas kapal perang Jepang.

Saat Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan, rakyat Sumatra Barat menyambut dengan sukacita. Tanggal 29 Agustus 1945 pemuda dan pemimpin politik memegang kendali penting dalam menyebarkan berita proklamasi. Para pemuda mendatangi kantor-kantor pemerintahan Jepang dan menuntut untuk menyerahkan gedung serta persenjataan kepada pihak pemuda. Pertempuran tidak bisa dihindarkan dan terjadi di Sungai Peruh, Painan. Langkah cepat diambil para pemimpin Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) di bawah pimpinan Ismail Lengah. Ismail Lengah mengirim kurir-kurir ke desa-desa untuk memanggil kembali para mantan *Giyugun*, *Heiho* dan *Seinendan* agar segera mendaftarkan diri menjadi anggota BKR. Yang tidak tergabung dalam BKR bisa membentuk badan-badan kelaskaran yang tetap diakui pemerintah.

Gedung-gedung perkantoran maupun rumah bekas tempat tinggal orang Jepang yang berhasil direbut pemuda kemudian diserahkan kepada Komite

Nasional Indonesia Daerah (KNID), yang pada waktu itu bertindak sebagai wakil pemerintah pusat. Kedatangan sekutu pada awalnya juga diterima baik di Sumatra Barat. Pasukan NICA yang didukung oleh Sekutu mulai berlaku angkuh dan semena-mena. NICA juga melakukan infiltrasi dan provokasi untuk mengajak pegawai-pegawai lama bekerja kembali pada Belanda dengan gaji yang lebih besar. Penurunan bendera Merah Putih di kantor Syahbandar Teluk Bayur, memulai meningkatkan suhu politik di Sumatra Barat. Agresi militer Belanda I berakhir dengan perundingan Linggarjati. Dalam Agresi Militer II Belanda menyerang Bukittinggi. Sampai April 1949, Belanda berhasil menguasai kota-kota penting di Sumatra Barat seperti Solok, Padang panjang, Bukittinggi, Batu Sangkar dll. Pasukan Belanda hanya menguasai kota-kota sedangkan di desa-desa, semuanya masih dikuasi oleh TNI dan rakyat.

Pada September 1945 rakyat Bengkulu telat menerima berita kemerdekaan. Pemuda di Bengkulu punya kesadaran untuk membentuk barisan dan organisasi pemuda sebagai wadah perjuangan. Tujuan mereka sama yaitu menyebarkan berita kemerdekaan dan melawan penjajah, baik Jepang maupun orang-orang berkulit putih. Ada beberapa badan perjuangan yang terbentuk di awal kemerdekaan. “Pembela Tanah Air” (PETA) terbentuk pada 30 Agustus 1945 di Manna. PETA diketuai oleh Buldani Masik. “Barisan Pemuda Indonesia” (BPI) diketuai oleh Nawawi Manaf dan dibentuk pada 10 September 1945. Pemuda di Curup membentuk “Barisan Perjuangan Republik Indonesia” (BPRI) dan diketuai oleh Nur Arifin. Pemuda di Kepahiang juga membentuk badan perjuangan dengan nama “Pemuda Republik Indonesia” (PRI).

PKR sebagai barisan pemuda dan organisasi berbasis militer berhasil merangkul seluruh mantan perwira *Giyûgun* dan *Heiho* juga para pemuda. PKR menjadi tempat belajar bagi pemuda tentang taktik perang dan berorganisasi. Bagi mantan perwira *Giyûgun* dan *Heiho*, PKR adalah badan keamanan yang sudah semestinya ada untuk memperjuangkan kemerdekaan. Walaupun pendidikan para pemuda hanya sebatas SR dan sebagian SMP, namun mereka pandai dan tanggap dengan segala perintah. PKR terbatas alat perang, namun semangat juang mereka berhasil mengalahkan Jepang. Penyerangan yang dilakukan menewaskan banyak anggota PKR di seluruh wilayah Bengkulu. Apalagi setelah kedatangan pasukan Inggris pada 10 November 1945, PKR meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaannya. Inggris yang memboceng Belanda sebagai utusan Sekutu menjadi perhatian khusus PKR di Bengkulu, khawatir mereka merebut dan menguasai Bengkulu lagi.

Hingga November 1945, telah banyak penyerangan yang ditujukan kepada pihak Jepang. Banyak anggota PKR yang tewas, begitu pula di pihak Jepang. Tidak jarang, selang beberapa hari setelah penyerangan, tentara Jepang melakukan patroli dan menangkap anggota PKR. Namun beberapa hari kemudian, setelah dilakukan perundingan antara kedua belah pihak, anggota PKR tersebut dibebaskan. Jepang kalah dalam hal negosiasi, karena mereka tetap butuh bantuan pangan dari rakyat Bengkulu sambil menunggu kedatangan Sekutu.

Keadaan Indonesia sejak Oktober 1945 tidak memungkinkan untuk diurus oleh sebuah badan militer sederhana. Presiden RI akhirnya mengeluarkan maklumat pada 5 Oktober 1945 untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat di

Indonesia. Sesuai dengan maklumat tersebut, maka PKR bertransformasi ke dalam TKR pada 15 November 1945. Bukan lagi sebuah badan atau organisasi militer sederhana, namun sudah menjadi tentara kesatuan yang sama dengan wilayah lainnya di Indonesia.